

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85).

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pembinaan mental spiritual, pembinaan sosial, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kesehatan dan kesejahteraan serta penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Bina Keagamaan, Bina Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB, Kebudayaan dan Pariwisata serta Bina Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

## **1.3 Maksud Dan Tujuan**

1. Maksud  
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Tahun 2018 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan  
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Tahun 2018.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III Tujuan dan Sasaran**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

### **BAB IV Program dan Kegiatan**

◇ memuat hal-hal sebagai berikut:

1. indikator kinerja;
2. Kelompok sasaran;
3. Lokasi kegiatan;
4. Kebutuhan dana indikatif
5. Sumber dana

### **BAB V Penutup**

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 Dan Capaian Renstra SKPD**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu evaluasi pelaksanaan Renja & perkiraan capaian tahun berjalan, pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program & kegiatan pelaksanaan, dan cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Guna menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, berkewajiban melaksanakan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2018 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan seyogyanya menggunakan indikator dan target masing-masing jenis pelayanan SPM yang akan dicapai pada tahun 2018.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

### 2.3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

Agar pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan perlu diupayakan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis
2. Penyediaan dana melalui APBD dan APBN yang memadai guna menjaga jaringan dengan mengupayakan peningkatan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### 2.3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

**Visi** Gubernur-Wagub 2016-2021 :

**" KALTENG MAJU, MANDIRI & ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, DAN HARMONIS) "**

**Misi :**

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Percepatan Pembangunan infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air Pesisir dan Pantai
4. Pengendalian inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Peningkatan aktivitas Perekonomian Masyarakat menuju KALTENG BERKAH
6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang profesional, adil dan anti korupsi
7. Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA)
9. Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Program :**

- Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
- Percepatan Pembangunan infrastruktur
  - a. Jalan, Jembatan;
  - b. Jalan Kereta Api;
  - c. Pelabuhan Udara;
  - d. Pelabuhan Laut, ASDP (Angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan)

- e. Kelistrikan.
- Pengelolaan Sumber Daya Air Pesisir dan Pantai
- Pengendalian inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan:
  - a. Pengendalian Inflasi;
  - b. Pertumbuhan Ekonomi;
  - c. Penanggulangan Kemiskinan.
- Peningkatan aktivitas Perekonomian Masyarakat menuju KALTENG BERKAH, perlu langkah-langkah strategi sebagai berikut :
  - a. Membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan berkarya di instansi Pemerintah maupun Swasta ;Mengupayakan agar setiap Rumah Tangga memiliki sumber usaha yang menghasilkan pendapatan tetap secara terus menerus guna membiayai kebutuhan hidup secara layak ;
  - b. Merasionalkan harga kebutuhan bahan pokok (pangan, sandang dan Perumahan) ;
  - c. Gerakan Fasitator desa yang berbasis pengembangan ekonomi kreatif pada lokal – lokal atau komunitas- komunitas tertentu ;
  - d. Gerakan sejuta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan dan bibit tanaman hutan ;
  - e. Mendukung dan mempercepat ijin usaha ekonomi menengah kebawah ;
- Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang profesional, adil dan anti korupsi :
  - a. Mempersiapkan SDM Aparatur Pelaksana Pemerintahan yang profesional & anti korupsi ;
  - b. Penempatan Personalia Aparatur Pemerintahan berdasarkan kapasitas dan kompetensinya ;
  - c. Mendukung pemekaran wilayah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya :
  - 1. Pendidikan :
    - a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan;
    - b. Mengotimalkan manajemen pendidikan dengan akhir kelulusan yang memiliki daya saing tinggi;
    - c. Peningkatan Kualitas Dosen/Guru pada semua jenjang di bidang pendidikan;
    - d. Pengiriman Mahasiswa berprestasi sekolah keluar negeri;
    - e. Revitalisasi kegiatan olah raga, seni budaya dan pembinaan general muda.
  - 2. Kesehatan :

- a. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana kesehatan termasuk peningkatan kualifikasi rumah sakit yang ada di Kalimantan Tengah;
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat & pemberantasan narkoba;
- c. Peningkatan kualifikasi Dokter dan Paramedis.

3. Sosial Budaya :

- a. Harmonisasi Kehidupan Sosial Kemasyarakatan;
- b. Memantapkan keberadaan masyarakat adat dayak dan kearifan lokal dalam filosofi budaya betang;
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta tujuan wisata di Kalteng;
- d. Pengembangan objek-objek pariwisata baik objek wisata budaya maupun wisata alam di Kalteng;
- e. Membuka pendidikan kepariwisataan untuk penyediaan tenaga pelayanan pariwisata di Kalteng.

• Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) :

- a. Pelaksanaan legislasi kepemilikan lahan melalui sertifikasi lahan bagi kelompok tani;
- b. Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis;
- c. Pengelolaan SDA secara berhati-hati serta berkelanjutan;
- d. Reboisasi dan Rehabilitasi lahan dan hutan;
- e. Penyediaan lahan yang cukup untuk pertanian tanaman pangan;
- f. Rehabilitasi dan Revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut 1 juta Ha.

• Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- a. Mendorong dan mengupayakan kerja-sama dengan Pihak Perguruan Tinggi dan Swasta untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Mengupayakan peningkatan volume APBD setiap tahunnya;.
- c. Peningkatan kompetensi SDM pengelola;

### 2.3.1 Tantangan dan Peluang Biro Kesra dan Kemasyarakatan

#### Tantangan :

##### a. Sumber Daya Manusia :

Menghadapi teknologi informasi yang semakin cepat dan global, diperlukan Sumber Daya Manusia yang siap pakai, terampil dan profesional di bidangnya. Untuk itu sangat dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai/staf melalui pendidikan dan pelatihan .

##### b. Sarana dan prasarana :

- 1) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu disediakan kendaraan dinas jabatan untuk Eselon III dan IV sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

#### Peluang :

Kesinambungan penyediaan dana melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunjang berbagai program kegiatan operasional, dengan diupayakan peningkatan dana dan penajaman prioritas program.

## BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

#### 1. Tugas Pokok

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pembinaan mental spiritual, pembinaan sosial, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kesehatan dan kesejahteraan serta penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Bina Keagamaan, Bina Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB, Kebudayaan dan Pariwisata serta Bina Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### 3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
- b. penyusunan bahan perencanaan strategis bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang Bina Keagamaan, bina sosial, bina kemasyarakatan serta Bina Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas Bina Keagamaan, bina sosial, bina kemasyarakatan serta kesehatan dan kesejahteraan;
- e. penyusunan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

### **3.2.1 Tujuan**

- Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.

### **3.2.2 Sasaran**

- Terwujudnya koordinasi yang efektif dan efisien dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan.
- Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dibidang Kesra.

## **BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN 2018**

**Berisi penjelasan mengenai :**

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam Renja SKPD Tahun 2018 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
  
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
  1. Indikator Kinerja;
  2. Kelompok Sasaran;
  3. Lokasi Kegiatan;
  4. Kebutuhan Dana Indikatif;
  5. Sumber Dana.
  
- Tabel yang disajikan adalah sebagaimana table 4.1 berikut :

## **V. PENUTUP.**

Demikian Rencana Kerja Tahun 2018 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas Pemerintah dan Pembangunan.

Palangka Raya,

2017

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN  
RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**H. SYAHRUDIN, SE  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19601223 198503 1 011**